

## PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Oleh:

**Muhammad Iqbal, Herman**

### ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Dampaknya Terhadap Pengembangan Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan otonomi daerah serta dampaknya terhadap pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir. Pemberian otonomi daerah dikategori tidak berjalan dengan baik pada pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu, pengaruh pelaksanaan atas pengembangan masyarakat dikategorikan tidak baik pada pengembangan fasilitas dasar, infrastruktur, begitu pula dengan pembangunan multi years. Dari hasil penelitian kerangka analisis teori sistem menunjukkan bahwa Pengembangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan kategori tidak baik (out come) dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2014.

**Kata Kunci:** *Otonomi Daerah, Pembangunan Masyarakat*

### ABSTRACT

*This study , entitled " Implementation of the Regions autonomi and Its Impact on Community Development in Indragiri Hilir " . The purpose of this study is to investigate the implementation of regional autonomy and its influence on development in Indragiri Hilir . Granting regional autonomy does not run properly categorized in Indragiri Hilir district. In addition , the effect on the implementation of community development are not well categorized on the development of basic facilities , infrastructure as well as the multi-year development . From the research framework of systems theory analysis showed that the Government Development Indragiri Hilir the category is not well ( out come ) with law No. 23 of 2014.*

**Key Word:** *Regional Autonomy, Community Development*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kebijakan pemberian otonomi daerah Indonesia adalah undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang bersifat *normative (law)* yang kemudian direvisi dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berarti bahwa aturan dari pemerintah pusat saja dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Walau bagaimanapun, sudah hampir enam dasawarsa pemberian otonomi daerah, nampaknya tidak menunjukkan suatu kemajuan yang signifikan bagi membangun masyarakat Indonesia pada umumnya. Ketidaksamaratan pembangunan semakin terlihat, begitu juga iklim demokrasi tidak berkembang secara wajar maupun kurang memberikan dampak kearah yang positif.

Menurut Siagian (2007:9), pembangunan adalah suatu badan usaha perobahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Manakala, pembangunan adalah ukuran kemajuan suatu negara bagi negara-negara kurang maju maupun negara-negara maju, sehingga kemunduran bagi negara-negara yang kurang maju boleh dilakukan pada satu dekade tertentu pula. Oleh

sebab itu, dari segi pembangunan adalah suatu rangkaian aktivitas-aktivitas pembaharuan, keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik yang dilakukan secara sadar dan terarah sehingga tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara menyeluruh.

Ryaas Rasyid (2002:384), berpendapat bahwa mengenai otonomi daerah berperan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dari segi keuangan. Peran ini penting untuk membangun masyarakat pedesaan khususnya kabupaten-kabupaten dan kota yang ada di wilayah provinsi Riau.

Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan lokasi penelitian penulis merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau, Kabupaten ini memiliki luas wilayah 11.605,97 km<sup>2</sup> dalam posisi: 0,36 Lintang Utara (*north latitude*): 0.7 Lintang Selatan (*south latitude*): 104.10 Bujur Timur (*east longitude*): 102.37 Bujur Timur (*west longitude*). Adapun batas-batas (*borders*) wilayah kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara Kabupaten Pelalawan.
2. Sebelah barat Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Sebelah timur Kabupaten Tanjung Balai Provinsi Kepulauan Riau.

4. Sebelah selatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

Kabupaten Indragiri Hilir terbagi dalam dua puluh (20) Kecamatan yang terbentang luas wilayah kabupaten tersebut diantaranya: Kecamatan Keritang, Reteh, Enok, Tanah Merah, Kuala Indragiri, Tembilahan, Tempuling, Batang Tuaka, Gaung Anak Serka, Gaung, Mandah, Kateman, Kemuning, Tembilahan Hulu, Pelangiran, Pulau Burung, Teluk Belekong, Concong, Kempas dan Sungai Batang.

Elemen penting selain dari pengembangan otonomi daerah adalah APBD. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah, Mendagri berwenang mengesahkan APBD provinsi dan Gubernur menegaskan APBD Kabupaten dan Kota. Hal ini, berakibat lemahnya *civil society* di berbagai Provinsi /Kabupaten/Kota. Oleh yang karena itu, maka kita melihat seringnya penyalahgunaan APBD yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota DPRD dalam menjalankan pemerintahan sehari-harinya. Selanjutnya, terjadi di pemerintahan Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir banyak proyek-proyek pembangunan fisik maupun non fisik kurang memberikan dampak terhadap pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Karena itu, pemerintah lebih menekan kepentingan politik semata-mata dalam arti untuk kepentingan pemerintah saja sehingga pembangunan tidak dirasakan oleh rakyat secara umum. Dengan adanya hal-hal di atas yang menjadi kasus besar dan menjadi perbincangan khalayak ramai khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir tersebut.

#### B. Rumusan Masalah

Dari fenomena dan permasalahan diatas munculah perumusan masalah yang dapat penulis kemukakan yaitu: Bagaimanakah Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Masyarakat Di Kabupaten Indragiri Hilir?.

#### STUDI KEPUSTAKAAN

Administrasi menurut Zulkifli (2014; 8) adalah mencangkup keseluruhan proses aktivitas kerja sama sejumlah manusia di dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Administrasi pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia yang berbasis otonomi daerah merupakan urat nadi dari segala aspek politik, ekonomi, budaya, maupun hukum sebagai supermasi yang tegak berdasarkan aspirasi masyarakat lokal yang bersumber dari administrator (Affan Gaffar, 2004:248).

Dalam rangka melaksanakan administrasi yang baik, maka perlu adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diantaranya adalah kebijakan otonomi daerah. Kebijakan menurut

Budiharjo adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Thomas Dye (dalam Subarsono, 2011:2) *public policy is whatever governments choose to do or not to do* (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan). Sedangkan menurut Widodo (dalam Hafis, 2015:7) kebijakan publik dibentuk untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuandan sasaran tertentu yang diinginkan serta berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan.

Terlepas dari Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah yang ada dan sebagai ukuran implementasi pemerintahan administrasi Kabupaten ini, sehingga dalam pelaksanaannya memberikan efek terhadap pemerintah lokal sehingga pembangunan kurang terkesan berpihak pada masyarakat lokal khususnya pada administrasi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Karena itu tanpa adanya kejelasan akan menimbulkan kerusuhan diberbagai negara-negara maju dan negara-negara kurang maju. Pada sisi lain, rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap penguasa lokal yang akan menimbulkan antipati serta kerusuhan dimana-mana (Umar Juoro, 2001:67). Untuk itu kejelasan konsep otonomi daerah harus memiliki kepuasan bagi masyarakat lokal sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda pula diberbagai daerah di Indonesia (The Liang Gie, 2010:105).

Otonomi daerah menurut Djaenuri (2015;36) adalah hak dan kewenangan untuk mengatur /memerintah daerahnya sendiri. Sementara konsep otonomi daerah sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan manajemen penilaian yang ada di berbagai daerah Provinsi/Kota/Kabupaten untuk merumuskan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa Renstra-SKPD yang telah dirumuskan oleh pemerintah lokal memiliki acuan dalam melaksanakan proyek-proyek pemerintah daerah yang tertuang dalam kerangka pembangunan nasional sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN). Implementasi dari itu adalah Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang - undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 sebagai tindaklanjut pembangunan nasional. Namun pada umumnya pelaksanaan pembangunan dalam rangka otonomi daerah hanya memihak pada kepentingan politik saja bukan kepentingan masyarakat lokal, begitu juga dengan kepentingan pemerintah berkuasa (Tohardi, 2002:18).

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah berbentuk kualitatif dan kuantitatif yang bersifat uraian berdasarkan informasi, data sekunder dan data primer melalui penelitian mekanisme kualitatif terbatas melalui suatu proses survei dimana sebanyak 200 responden didistribusikan kepada staf pemerintah kabupaten/ kota dan masyarakat lokal, kemudian disederhanakan menjadi sampel yaitu berjumlah 138 responden dan 62 responden untuk staf Pemerintah Kantor/Dinas/Badan sebagai responden. Dasar penentuan sampel daerah harus disesuaikan dengan berbagai macam data yang akan diteliti yaitu faktor biaya, waktu yang tersedia dan kriteria daerah tersebut. Apa yang jelaskan dalam analisis penelitian ini adalah pendapat responden dan masukan dari kantor Bupati/Dinas/Badan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Lingkup penelitian ini melihat kepada pelaksanaan pembangunan dalam aspek otonomi daerah serta dampaknya terhadap pembangunan Di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir (dengan Ibu Kotanya Tembilahan).

Seperti yang dibicarakan dalam bagian kerangka analisis, maka analisis kualitatif akan dilakukan melalui sumber-sumber primer, sekunder, dan dari perpustakaan. analisis akan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu dalam bentuk penilaian menggunakan persentase. Pertanyaan-pertanyaan penelitian akan dikirim kepada responden dan diharapkan jawaban mereka terhadap pertanyaan terkait dengan penelitian ini akan dapat dianalisis melalui pendekatan deskriptif tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN (Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir)

Adapun indikator pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Dasar Dan Infrastruktur.
2. Pelaksanaan Pembangunan *Multi Years* Antara Tahun 2010 Hingga 2015.
3. Penilaian Pendidikan Dan Pendapatan.
4. Efisiensi Bertindak Dari Pihak Pemerintah Kabupaten.
5. Melarang Pegawai Negeri Sipil Berpolitik.
6. Hubungan Pegawai Negeri Sipil Dengan Masyarakat Tempatan.
7. Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Pelaksanaan Dan Keberkesanan Program Pembangunan.
8. Budaya Politik Di Kabupaten Indragiri Hilir.
9. Peranan DPRD Di Dalam Pembangunan.

### 1. Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Dasar Dan Infrastruktur

Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2: Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Dasar Dan Infrastruktur.

Pembangunan	Positif	Netralitas	Negatif
Fasilitas Dasar	19 (9,5)	18 (9)	79 (39,5)
Infrastruktur	4 (2)	53 (26,5)	2 (13,5)
Jumlah	23 (11,5)	71 (35,5)	106 (53)

Sumber: Data Olahan Lapangan 2017.

Konteks otonomi daerah adalah merupakan konsep yang ada dimana bisa diartikan dalam konteks mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah jugadapat diartikan dalam konteks pembangunan dalam segala aspek kehidupan manusia. Pada hasil penelitian otonomi daerah lebih fokus pada konteks pembangunan fasilitas dasar dan pembangunan infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Dari hasil penelitian yang didapat penulis bahwa pembangunan fasilitas dasar dengan kategori negatif 39,5 persen responden , kategori netral yaitu sebesar 9 persen responden dan dengan kategori positif sebesar 9,5 persen responden. Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur kategori negatif sebesar 13,5 persen responden, netral sebesar 26,5 persen responden , serta positif sebesar 2 persen responden saja.

### 2. Pelaksanaan Pembangunan *Multi Years* Antara Tahun 2012 Hingga 2017

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2: Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Pembangunan *Multi Years*.

Pembangunan	Positif	Netralitas	Negatif
Ekonomi	7 (3.5)	0 (0)	10 (5)
Sosio-Ekonomi	27 (13.5)	8 (4)	0 (0)
Parti Politik	0 (0)	13 (6.5)	0 (0)
Pemerintah Pusat	0 (0)	5 (2.5)	1 (0.5)
Pemerintah Kabupaten	119 (59.5)	0 (0)	10 (5)
Jumlah	153 (76.5)	26 (13)	21 (10.5)

Sumber: Data Olahan Lapangan 2017.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh bahwa pembangunan *multi years* yang dilakukan di kabupaten Indragiri Hilir bersifat untuk kepentingan pemerintah Kabupaten saja, dan sedikit yang bersifat sosio-ekonomi. Sebanyak 59,5 persen atau 119 responden pembangunan bersifat kepentingan pemerintah Kabupaten dengan kategori positif, 13,5 persen atau 27 responden dengan kategori positif untuk kepentingan pada sektor sosio-ekonomi, dan 6,5 persen atau 13 responden dengan kategori netral yang pembangunan bersifat kepentingan partai politik saja. Selain itu, masing-masing sebanyak 5 persen atau 10 responden dengan kategori negatif yang sifat pengembangan bersifat ekonomi dan pemerintah Kabupaten, 4 persen atau 8 responden dengan kategori netral pembangunan bersifat sosio-ekonomi, hanya 3,5 persen atau 7 responden dengan kategori positif pembangunan bersifat pemerintah ekonomi saja.

### 3. Penilaian Pendidikan Dan Pendapatan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3: Tanggapan Responden Tentang Penilaian Pendidikan

Pendidikan Responden	Frekuensi	Persen
Tidak Tamat Sekolah Dasar	0	0
Tamat Sekolah Dasar	15	7,5
Tidak Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	22	11
Tidak Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	3	1,5
Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	141	70,5
Diploma	1	0,5
Sarjana Muda	0	0
Sarjana	13	6,5
Lain-Lain (Post-Graduate)	5	2,5
Jumlah	200	100,0

Sumber: *Data Olahan Lapangan 2017*.

Pendidikan merupakan pandangan hidup yang layak bagi berbagai manusia dipermukaan bumi ini, sehingga ia dapat meningkatkan pendapatan bagi rakyat tersebut. Pada tahap awal pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi peningkatan pengetahuan seseorang dan selanjutnya ia menjadi tenaga yang expert dibidang tertentu bagi berbagai manusia yang lain pula tetapi dapat melibatkan para ahli yang lain sehingga terkait antara satu aspek dengan aspek lainnya. Jadi pendidikan merupakan wujud nyata yang tidak

dapat dipisahkan antara kehidupan manusia dengan pendidikan itu sendiri sebagai sumber pendapatan masyarakat lokal khususnya.

Berdasarkan survei pada kebanyakan responden berpendidikan rata-rata tamat sekolah dasar dan sekolah sebesar 70,5 persen atau 141 responden, tamat secondary school sebanyak 11 persen atau 22 responden dan tamat sekolah dasar sebesar 7,5 persen atau 15 responden. Selain itu sarjana yaitu sebanyak 6,5 persen atau 13 responden, sebanyak 2,5 persen atau 5 responden tamat post graduate dan tidak tamat SMA sebanyak 1,5 persen atau 3 responden. Namun, ia merupakan cerminan bagi satu bangsa, apakah bangsa itu tergolong yang maju atau tergolong kurang maju sehingga ia merupakan ukuran berbagai pendidikan yang dimiliki setiap bangsa yang ada didunia ini . Namun pada kenyataan di daerah penelitian pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pendidikan masyarakat lokal kategori rendah.

Untuk lebih jelasnya mengenai pendapatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4: Tanggapan Responden Tentang Penilaian Pendapatan

Pendapatan	Frekuensi	Persen
Kurang Dari Rp1,500,000,-	9	4.5
Rp1,500,000- Rp2,500,00	15	7.5
Rp2,500,000 hingga Rp3,500,000.-	162	81
Rp3,500,000 hingga Rp4,500,000.-	7	3.5
Rp4,500,000 hingga Rp5,500,000.-	4	2
Rp 5,500,000 Ke atas	3	1.5
Jumlah	200	100.00

Sumber: *Data Olahan Lapangan 2017*.

Namun, pendapatan masyarakat setempat relatif rendah dalam hal pendapatan rata-rata sebesar Rp 1.500.000 hingga Rp 3.500.000 juta, atau 3,5 persen atau 7 responden menjadi Rp 3.500.000 hingga Rp 4.500.000 juta, 2 persen atau 4 responden menjadi Rp 4.500.000 hingga Rp 5.500.000 juta dan 1,5 persen atau 3 responden mendapat Rp 5.500.000 juta ke atas.

Di sisi lain, orang-orang dengan sedikit opini, mereka dapat membeli berbagai kebutuhan sehari-hari seperti daging dan unggas di awal bulan dan mereka dapat menghemat uang untuk bank pemerintah dan swasta. Selanjutnya mereka dapat meminjam secara finansial untuk semua kebutuhan rumah tangga mereka. Namun, bagi mereka yang berpenghasilan menengah tidak bisa berbuat apa-apa, itu terbatas pada sumber pendapatan mereka. Tetapi selama 10 tahun terakhir, tahap-tahap penghasil pendapatan mereka benar-benar

merupakan peningkatan yang signifikan bagi masyarakat setempat, terutama di Indragiri Hilir.

#### 4. Efisiensi Tindakan Dari Pihak Pemerintah Daerah

Cepat dan lambat adalah proses manajemen administratif untuk berbagai hal kebutuhan masyarakat lokal seperti permintaan permohonan izin lahan, kartu tanda penduduk, izin bangunan, akta kelahiran dan lainnya. Kemudahan manajemen memberikan manfaat bagi masyarakat setempat membutuhkannya dilakukan oleh berbagai pegawai Negeri dibidang administrasi pemerintahan terutama di Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk jelasnya mengenai Efisiensi Tindakan dari Pihak Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5: Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Tindakan Dari Pihak Pemerintah Daerah

Tindakan Pemerintah Indragiri Hilir	Positif	Netral	Negatif
Cepat	4 (2)	0 (0)	6 (3)
Kurang Cepat (Sederhana)	0 (0)	8 (4)	1 (0,5)
Lambat	127 (63,5)	12 (6)	4 (2)
Sangat Lambat	18 (9)	5 (2,5)	0 (0)
Gagal	2 (1)	4 (2)	9 (4,5)
Jumlah	151	29	20

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2017

Berdasarkan hasil penelitian bahwa administrasi pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan lambat, terbukti 63,5 persen atau 127 responden dengan kategori positif, serta sangat lambat 9 persen atau 18 responden dengan kategori positif, selain itu, 6 persen atau 12 responden dalam proses manajemen lambat dengan kategori pengecualian adalah 4 persen atau 8 responden dengan kategori kurang cepat, dan 3 persen atau 6 responden dengan kategori negatif dalam proses manajemen yang sangat lambat. Namun, tindakan pemerintah daerah otonom dari Kabupaten Indragiri Hilir segera mengurus kepentingan masyarakat setempat, sehingga memberi dampak- positif bagi pemerintah itu sendiri. Namun disisi lain, ada dampak negatif pada masyarakat ketika manajemen terlambat dalam proses administrasi sehingga masyarakat setempat menjadi bosan untuk berurusan dengan kantor / lembaga lokal / lembaga pemerintah untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan. Tetapi kondisi ini membiarkan mereka

melakukannya sampai kurangnya otoritas dalam semua aspek manajemen mereka.

#### 5. Melarang Pegawai Negeri Sipil Berpolitik

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1980 tentang larangan pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya masih ada pegawai yang mengikuti kegiatan politik, karena Bupati Indragiri Hilir Bapak Drs. H. M. Wardan, MP. Namun, dalam menegakkan hukum untuk mengikat pegawai negeri tidak dapat terlibat dalam bagian partai mana pun tetapi Golkar memiliki pemerintah daerah sehingga mereka lebih tertarik pada politik untuk meningkatkan upaya kemenangan mereka dalam pemilihan nanti.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6: Tanggapan Responden Tentang Melarang PNS Berpolitik

Parti Politik	Frekuensi	Persentase
Terlibat	83	41.5
Tidak Terlibat	117	58.5
Jumlah	200	100.00

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2017

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dapat dilibatkan, ini terbukti dengan 58,5 persen atau 117 responden tidak dapat melibatkan politik, dan sebanyak 41,5 persen atau 83 responden yang tidak melibatkan politik, ini dengan cara apa pun pejabat tidak dapat terlibat dalam politik apa pun.

Keterlibatan masyarakat dalam politik hanyalah sebagai simbol, karena partai politik yang ada di masa lalu dan sekarang terlalu banyak kebohongan tentang janji partai politik yang mendukung pemerintah yang berkuasa saat itu. Tetapi realitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan fasilitas dasar tidak disadari di daerah pemilihan mereka. Inilah yang membuat ketidakpuasan dengan janji-janji yang dibuat oleh perwakilan terpilih.

#### 6. Hubungan Pegawai Negeri Sipil dengan Komunitas Setempat

Kunjungan pemerintah (Pegawai) adalah suatu keharusan untuk menjaga keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat setempat. Karena kedua belah pihak bergantung satu sama lain, sehingga menciptakan harmoni di antara mereka. Sementara hubungan kerja saling terkait erat antara kedua pihak, mereka merasa tertarik untuk menjalin kerja sama yang erat.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7: Tanggapan Responden Tentang Hubungan PNS dengan Komunitas Setempat

Kunjungan Pegawai	Frekuensi	Persentasi
Tidak Pernah	48	24
Jarang	127	63,5
Sekali-Kali	25	12,5
Jumlah	200	100,00

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2017

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Indragiri Hilir bahwa hubungan antara pejabat pemerintah dan masyarakat setempat masih gagal dalam arti kunjungan pejabat (pemerintah) jarang kecamatan / kelurahan. Pendapat diatas di dermaga Kantor Bupati Indragiri Hilir (wawancara oleh Mr. Rasid, 2016). Sebanyak 63,5 persen atau 127 responden yang jarang mengunjungi Kabupaten Indragiri Hilir, belum pernah berkunjung 24 persen atau 48 responden dan sesekali dikunjungi sebanyak 12,5 persen atau 25 responden.

### 7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi dan Efektivitas Program Pengembangan

Faktor Pertama (1) adalah peran DPRD sebagai tekad dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada berbagai aspek sehingga dapat direalisasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan mereka merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, program/proyek yang direncanakan oleh administrasi otonomi daerah, terutama Kabupaten Indragiri Hilir harus didukung oleh Dewan. Selain itu dewan dapat melakukan apapun yang diminta oleh pemerintah setempat dan tidak ada yang bisa dilakukan. karena itu, dewan memiliki kekuatan yang sama dengan pemerintah yang dijadikan petugas kepolisian Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pemegang saham dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya, sebagai faktor kedua (2) Keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan program / proyek di Kabupaten Indragiri Hilir. Ini berarti bahwa tanpa cukup uang, program / proyek seharusnya tidak berfungsi dengan baik. Namun, distribusi keuangan oleh pemerintah pusat, manajemen keuangan harus dikelola dengan baik agar tidak merusak keuangan negara. Sementara keuangan harus diperbarui oleh pemerintah sebagai pemeliharaan pembangunan di berbagai sumber keuangan. Di sisi lain, pemerintah Indragiri Hilir dalam melakukan pembangunan harus memperhatikan aspirasi orang-orang yang menjadi bagian dari kehidupan mereka dan manfaatnya dapat dirasakan oleh mereka.

Di sisi lain, faktor ketiga (3) adalah bahwa sektor swasta memainkan peran penting dalam melaksanakan proyek / program pemerintah, karena tanpa pihak swasta dalam tender yang disediakan oleh pemerintah untuk membangun jalan, bangunan, masjid, rumah dinas / badan / Kantor dan lainnya. Pemerintah sangat membutuhkan sektor swasta untuk membangun di atas, sehingga pihak swasta dapat memanfaatkan aspek-aspek tersebut untuk dapat menindaklanjuti program / proyek pemerintah yang direncanakan.

Namun, faktor keempat (4) adalah peran pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya Dinas Permukiman dan Infrastruktur (Kimprawil), untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di semua kecamatan atau kecamatan yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir. Kantor Kimprawil yang memperbaiki bangunan seperti jalan, kantor / kantor / rumah kantor, mesjid, jembatan, dan sebagainya. Pemerintah Provinsi memberikan bantuan dengan program berbagi anggaran untuk membantu pemerintah kabupaten / kota kekurangan anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat. program ini diambil dari pemerintah provinsi APBD Provinsi Riau, yang disalurkan ke Kabupaten / Kota yang memerlukannya.

### 8. Budaya Politik Di Kabupaten Indragiri Hilir

Partisipasi politik masyarakat adalah hak komunitas untuk ditempatkan dalam kegiatan politik yang tidak mengikat. Tetapi partisipasi orang-orang akan memiliki pengaruh dalam partisipasi pemerintah dan partai-partai oposisi. Di sisi lain, pengaruh politik disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, pendidikan seseorang, melalui media elektronik, atau media cetak. Saluran ini memiliki efek yang berarti pada berbagai individu dan dapat memperoleh manfaat dari setiap pelanggan.

Untuk jelasnya dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 8: Tanggapan Responden Tentang Budaya Politik Di Kabupaten Indragiri Hilir

Pengaruh Partai Politik yang Berpartisipasi	Frekuensi	Persentase
Pendidikan	20	10
Media Elektronik (Radio, Televisi dan Internet)	142	71
Media Cetak (Akhbar, Brosur)	38	19
Jumlah	200	100,00

Sumber: Data Olahan Lapangan 2017.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pengaruh partisipasi partai politik sebesar 71 persen atau 142 responden dipengaruhi oleh media elektronik, 19 persen atau 38 responden melalui media cetak (koran atau brosur) dan 10 persen atau 20 responden melalui pendidikan. Hal ini terbukti pada hasil penulis mempelajari bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh media elektronik khususnya Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Sementara budaya politik dapat mencerminkan perilaku seseorang dalam memilih media massa atau media elektronik untuk menemukan isu-isu terkini tentang metode politik.

## 9. Peranan DPRD Di Dalam Pembangunan

Perwakilan rakyat berhasil atau tidak berhasil dalam membawa perubahan dalam pengembangan bidang-bidang tertentu. Di negara-negara berkembang, wakil rakyat tidak membawa banyak perubahan signifikan dalam pembangunan kepada rakyat mereka sendiri tetapi kepentingan partai lebih penting, sehingga ada perkembangan yang diharapkan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan dengan peran DPRD yang lebih kecil, khususnya Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk lebih jelasnya mengenai hal di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7: Tanggapan Responden Tentang Budaya Politik di Kabupaten Indragiri Hilir

Peranan Anggota DPRD	Frekuensi	Persentase
Berperan	12	6
Kurang Berperan	28	14
Sama Sekali Tidak Berperan	160	80
Jumlah	200	100,00

Sumber: Data Olahan Lapangan 2017

Berdasarkan temuan penelitian, peran anggota DPRD tidak berhasil, membuktikan bahwa 80 persen atau 160 responden, 14 persen atau 28 responden kurang berhasil dan yang hanya mengelola 6 persen atau 12 responden, ini berarti

pengembangan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dikategorikan sebagai kurang berhasil dalam aspirasi pengembangan masyarakat lokal khususnya konstituen mereka. Ini juga berlaku bagi anggota DPRD bahwa aspirasi masyarakat lokal tidak berhasil dalam semua aspek-aspek ekonomi dan sosial (wawancara oleh Mhd Ali, 2009).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir mulai tumbuh dan tidak tertinggal dengan Kabupaten Indragiri Hulu yang sangat dekat. Namun, pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir lebih maju daripada Kabupaten Indragiri Hulu baik di bidang ekonomi, politik, hukum atau budaya. Ini karena kepemimpinan Mr. Drs. H. M. Wardan, SP, membawa daerah ini lebih maju di sektor pertanian, terutama kelapa dan minyak sawit menjadi benih utama bagi masyarakat lokal. Melalui pengembangan industri kelapa di PT. Pulau Sambu di Distrik Kuala Enok memiliki banyak penyerapan tenaga kerja terutama masyarakat lokal.

Di sisi lain, pembangunan telah gagal, tetapi masih belum efektif untuk mengkoordinasikan proyek-proyek pembangunan yang seimbang sehingga akan tumbuh secara teratur dan komprehensif untuk semua kabupaten Indragiri Hilir. Pembangunan menjadi semakin penting untuk pengembangan suatu daerah sehingga daerah tersebut bermanfaat bagi masyarakat setempat, terutama dalam penyediaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pengembangan kebutuhan dasar yang mereka lihat secara langsung.

Proyek pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau tidak efektif dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar, pembangunan dan pengembangan *multi years* dari 2012 hingga 2017, pendidikan lokal dan penilaian pendapatan, melarang pegawai negeri sipil politik, hubungan pegawai negeri sipil dengan masyarakat lokal, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelaksanaan dan efektivitas pembangunan dan peran anggota DPRD.

### B. SARAN

Berdasarkan penelitian ini, peneliti berpandangan bahwa ada beberapa kelemahan yang dapat diperbaiki oleh peneliti berikutnya dengan menghasilkan studi yang lebih komprehensif. Namun, diakui bahwa semua temuan ini sesuai. Di sini, peneliti ingin memberikan beberapa saran antara lain:

Dengan harapan bahwa perubahan akan meningkatkan efektivitas proyek pembangunan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Direkomendasikan bahwa otoritas administrasi Indragiri Hilir harus menekankan pada manajemen yang lebih efisien terutama pada hal-hal (proyek-proyek pembangunan) yang disediakan oleh pemerintah pusat, pemerintah lokal tenaga kerja dan masalah penggunaan dan pemborosan uang dan tenaga kerja.

Proyek-proyek pembangunan harus memiliki kerja sama dan dukungan yang erat dari staf lokal dan lokal yang berkuasa atau lokal serta anggota DPRD.

Pemerintah administrasi pembangunan harus kooperatif dan memainkan peran aktif dalam semua aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan hukum sehingga dapat menciptakan administrasi pembangunan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aceng, Djaenuri, Aries. 2015. *Sisitem Pemerintahan Daerah*. Tangerang Selatan, Univeristas Terbuka Press.
- Affan. Gaffar. 2004 *Paradigma Baru Otonomi Daerah*. Jakarta. Lembaga Studi Pembangunan Indonesia.
- Ali, Zaini, Alhafis Raden Imam. 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Budiharjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ryaas Rasyid, 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sondang P. Siagian, 2007. *Administrasi Pembangunan :Konsep Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta, Pustaka Pelajar.
- The Liang Gie. 2010. *Sistem Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta. Gunung Agung.
- Tohardi. 2002. *Organisasi Dengan Kepemimpinan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Umar Juoro. 2001. *Pemulihan Ekonomi, Lambat dan Rentan Terhadap Gejolak Politik*. Jakarta. Lembaga Studi Pembangunan Indonesia.
- Zulkifli, Yogia Moris A. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

#### **Peraturan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah